

BAB V PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan tentang efektivitas dan dampak program pengentasan kemiskinan di Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan implementasinya begitu banyak program yang telah terlaksana di Nagari Sungai Pinang. Program pengentasan kemiskinan yang pernah ada di Nagari Sungai Pinang secara garis besar terbagi dua, yaitu yang bersifat *Charity* (sumbangan) berupa (program pemberian barang atau benda) dan bersifat pemberdayaan. Pada dasarnya program *charity* (sumbangan) ini bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak terpuruk pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok jangka pendek. Diantara program yang bersifat *charity* (sumbangan) masuk di Nagari Sungai Pinang berupa bantuan barang dan uang. Sementara program yang mengatasnamakan pemberdayaan antara lain bantuan ternak kambing, ayam dan sapi berkelompok. Selain itu juga ada dalam bentuk budi daya rumput laut dan keramba ikan kerapu. Khusus untuk masyarakat bermata pencaharian nelayan ada juga bantuan *biduak pukek*, perahu dan mesin perahu. Akan tetapi program tersebut tidak terimplementasi dengan baik, baik dalam sisi peningkatan pengetahuan, keterampilan peserta, maupun dalam penguatan kelembagaan. Program yang mengatasnamakan pemberdayaan belum bersifat pemberdayaan, karena belum dilakukan langkah-langkah pemberdayaan, dan belum disiapkan pendamping yang mumpuni dalam program yang diterapkan. Secara umum tidak terlihat adanya langkah-langkah pemberdayaan yang dilakukan, sehingga program yang pernah dilaksanakan di nagari tidak berbekas, karena tidak ada kelembagaan yang bertanggungjawab terhadap program.
2. Berdasarkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Nagari Sungai Pinang. Efektivitas merupakan sebuah pencapaian yang sudah tercapai berdasarkan kualitas dan kuantitas yang sudah direncanakan dalam sebuah

program. Program tersebut seperti program pengentasan kemiskinan yang sudah diprogramkan dan dilaksanakan oleh pemerintah di Nagari Sungai Pinang. Program pengentasan kemiskinan ini sudah dilaksanakan dari era pemerintahan Soeharto, era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan era pemerintahan saat ini yaitu Joko Widodo. Bantuan kemiskinan itu sudah beragam bentuknya seperti adanya program bantuan tersebut bersifat *Charity* (sumbangan) dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Bantuan *charity* itu seperti bantuan sapi, kambing, ayam, budi daya ikan kerapu dan budidaya rumput laut. Program bantuan ini diberikan semenjak tahun 2000 sampai 2019. Sedangkan bantuan bersifat pemberdayaan masyarakat yaitu bantuan *biduak pukek* dan perahu mesin yang diberikan pada tahun 2020. Anggaran bantuan ini berasal dari dana desa yang dianggarkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin yang bermata pencaharian nelayan. Pelaksanaan program dikatakan efektif jika pelaksanaan program dapat memberikan manfaat sesuai dengan pelaksanaan mudah diterima, persyaratan yang lebih mudah dan sederhana. Akan tetapi program tersebut belum cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan, karena tidak berdampak kepada peningkatan keterampilan, pengetahuan dan peningkatan ekonomi keluarga miskin.

1.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang dilihat mengenai efektivitas dan dampak program pengentasan kemiskinan di Nagari Sungai Pinang, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh penulis yakni:

1. Mengingat pentingnya efektivitas dan dampak program pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan terspesifikasi perprogram tentang efektivitas dan dampak program pengentasan kemiskinan di Nagari Sungai Pinang.
2. Berdasarkan angka kemiskinan yang mengalami peningkatan drastis di Nagari Sungai Pinang. Seharusnya program pengentasan kemiskinan yang sudah banyak digencarkan tersebut dilaksanakan secara terorganisir oleh pihak nagari dan para pendamping program bantuan kemiskinan. Supaya bantuan yang ada bisa efektif mengentaskan kemiskinan. Sehingga bisa berdampak kepada

peningkatan pengetahuan, keterampilan dan peningkatan ekonomi keluarga miskin.

3. Pemerintah nagari mestinya mendokumentasikan setiap program yang telah dilaksanakan, supaya dapat dijadikan alat evaluasi baik untuk melanjutkan program atau belajar dari kesalahan.

